

Analisis Kontribusi Pemerintah terhadap Masalah Kepailitan Badan Usaha Milik Negara

Khansa Inggita Sari¹, Vedy Marchindy Andea², Nanda Putri Agustina³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

e-mail: khasainggita91@students.unnes.ac.id¹,

vedyamarchindyandea@students.unnes.ac.id², nandaputri@students.unnes.ac.id³

Abstrak

Kepailitan badan usaha milik negara (BUMN) menjadi masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara. Pemerintah sebagai pemilik mayoritas saham dalam BUMN memiliki peran penting dalam mengatasi masalah kepailitan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian masalah kepailitan BUMN. Kontribusi pemerintah terdiri dari beberapa langkah, seperti penyediaan dana talangan, restrukturisasi keuangan, dan pemilihan manajemen yang tepat. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam mengambil keputusan strategis untuk mengatasi masalah-masalah struktural dalam BUMN yang dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan BUMN. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi masalah kepailitan BUMN sangat penting. Pemerintah harus terus memperkuat perannya dalam mengawasi dan mengontrol kinerja BUMN serta membantu BUMN dalam mengatasi masalah keuangan dan operasional yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN agar dapat menghindari terjadinya masalah kepailitan di masa depan.

Kata Kunci: *Kepailitan, Masalah, Pemerintah, BUMN, Kontribusi*

Abstract

Bankruptcy of state-owned enterprises (SOEs) is a complex problem that has significant impacts on the country's economy. The government, as the majority shareholder in SOEs, has a crucial role in addressing this bankruptcy issue. This research aims to analyze the government's contribution to the bankruptcy problem of SOEs from a commercial law perspective. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results show that the government has a significant contribution to the resolution of SOE bankruptcy problems. The government's contribution consists of several steps, such as providing bailout funds, financial restructuring, and selecting the appropriate management. Additionally, the government also plays a role in making strategic decisions to address structural problems within SOEs that can affect their performance and financial stability. From the results of the research, it can be concluded that the government's role in addressing SOE bankruptcy problems is crucial. The government must continue to strengthen its role in monitoring and controlling the performance of SOEs and assisting SOEs in addressing financial and operational problems that can threaten their survival. Additionally, it is also important for the government to improve transparency and accountability in managing SOEs to avoid future bankruptcy problems.

Keywords: *Learning Resources, Motivation, Conceptual Understanding*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian suatu negara. BUMN, sebagai entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah, bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik, menciptakan lapangan kerja, dan

mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam beberapa kasus, BUMN dapat menghadapi masalah kepailitan yang mengancam keberlanjutan operasional mereka. Masalah kepailitan ini tidak hanya berdampak pada BUMN itu sendiri, tetapi juga dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi negara.

Analisis mengenai kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan BUMN menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan operasional BUMN serta dampaknya terhadap perekonomian negara. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan dukungan kepada BUMN, sehingga kebijakan dan tindakan pemerintah dapat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya masalah kepailitan pada BUMN.

BUMN merupakan aset penting bagi perekonomian suatu negara. BUMN memiliki peran strategis dalam berbagai sektor seperti energi, transportasi, telekomunikasi, keuangan, dan banyak lagi (Avianti, 2006). Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang efisien dan berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja. Namun, beberapa BUMN mengalami masalah keuangan yang serius, yang dapat berujung pada kepailitan.

Beberapa contoh BUMN yang mengalami masalah kepailitan adalah perusahaan penerbangan, perusahaan energi, dan lembaga keuangan milik negara. Masalah kepailitan pada BUMN dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat meliputi kebijakan manajemen yang buruk, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan struktur birokratis yang kompleks. Sedangkan faktor eksternal dapat meliputi fluktuasi pasar, persaingan yang ketat, dan perubahan kebijakan pemerintah.

Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat penting dalam mengelola masalah kepailitan BUMN. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi operasional BUMN dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas bisnis mereka. Pemerintah dapat mempengaruhi kondisi keuangan BUMN melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, pengaturan yang transparan, dan pengawasan yang efektif (Felix, 2021)

Dalam banyak kasus, pemerintah juga memberikan dukungan keuangan langsung kepada BUMN yang menghadapi masalah keuangan serius. Dukungan ini dapat berupa penyertaan modal, restrukturisasi utang, atau pengadaan bantuan keuangan lainnya (Avianti, 2006). Tujuan dari dukungan ini adalah untuk membantu BUMN mengatasi masalah keuangan dan mencegah terjadinya kepailitan yang dapat memiliki dampak negatif yang luas.

Namun, penting untuk mencatat bahwa kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan BUMN tidak selalu positif. Terkadang, campur tangan pemerintah yang berlebihan atau keputusan politik yang tidak tepat dapat memperburuk masalah keuangan BUMN (Davids et al., 2021). Intervensi politik yang tidak rasional atau penyalahgunaan BUMN untuk kepentingan politik tertentu dapat mengganggu kinerja operasional dan menghambat kemampuan BUMN untuk mengatasi masalah keuangan.

Dalam konteks yang lebih luas, kepailitan BUMN juga dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada perekonomian negara. Kepailitan BUMN dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja, ketidakstabilan pasar, penurunan pendapatan pemerintah, dan ketidakpastian investasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan BUMN agar langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk mencegah, mengatasi, atau mengurangi dampak dari masalah tersebut ((Davids et al., 2021)

Penelitian tentang analisis kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan badan usaha milik negara sangat penting karena BUMN memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. BUMN adalah perusahaan besar yang dimiliki oleh negara dan memainkan peran strategis dalam menyediakan barang dan jasa vital bagi masyarakat. BUMN juga memberikan kontribusi penting pada penerimaan negara melalui pembayaran pajak, royalti, dan dividen.

Namun, keberadaan BUMN juga dapat menimbulkan masalah. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh BUMN adalah masalah kepailitan. Kepailitan BUMN dapat berdampak pada hilangnya lapangan kerja, penurunan pendapatan pemerintah, ketidakpastian investasi, gangguan pasokan barang dan jasa, dan mengganggu sistem keuangan dan kestabilan pasar.

Oleh karena itu, penelitian tentang analisis kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan BUMN sangat penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang

penyebab dan solusi dari masalah ini. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan regulator dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mencegah dan mengatasi masalah kepailitan BUMN (Srimulyo, 2001).

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi para investor, pemegang saham, dan pelaku pasar lainnya yang tertarik dengan BUMN. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan masalah kepailitan BUMN, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan meminimalkan risiko investasi mereka (Felix, 2021)

Penelitian tentang analisis kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan BUMN juga penting karena dapat memberikan pemahaman tentang kondisi keuangan dan operasional BUMN secara lebih baik. Dengan memahami kondisi keuangan dan operasional BUMN, pemerintah dapat memberikan dukungan dan restrukturisasi utang bagi BUMN yang mengalami masalah keuangan serius, sehingga BUMN dapat memulihkan kinerja operasionalnya dan terus memberikan kontribusi positif pada perekonomian negara.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi manajemen BUMN dalam mengelola perusahaan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan masalah kepailitan BUMN, manajemen BUMN dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan meminimalkan risiko yang terkait dengan kepailitan.

Secara keseluruhan, penelitian tentang analisis kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan BUMN sangat penting untuk memahami peran BUMN dalam perekonomian suatu negara dan memberikan masukan bagi pemerintah, regulator, investor, pemegang saham, pelaku pasar, manajemen BUMN, dan masyarakat umum dalam mengatasi dan mencegah masalah kepailitan BUMN.

Sebagai sebuah topik yang penting dan kompleks, sudah banyak penelitian sebelumnya yang dilakukan mengenai analisis kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan badan usaha milik negara. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kepailitan BUMN, seperti kinerja keuangan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan (Hutajulu, 2020)

Sebagai contoh, penelitian oleh Arifin (2018) mengungkapkan bahwa faktor-faktor internal seperti manajemen yang lemah dan tata kelola yang buruk merupakan penyebab utama terjadinya kepailitan BUMN di Indonesia. Penelitian tersebut menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat tata kelola perusahaan BUMN untuk menghindari terjadinya masalah kepailitan di masa depan.

Penelitian lainnya oleh Riani et al. 2019 menyoroti pentingnya restrukturisasi keuangan sebagai salah satu langkah dalam mengatasi masalah kepailitan BUMN. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dapat memberikan dukungan melalui penyediaan dana talangan dan program restrukturisasi keuangan yang efektif untuk membantu BUMN dalam mengatasi masalah keuangan dan operasional.

Selain itu, penelitian oleh Rachmawati dan Sugiarti (2020) mengungkapkan bahwa faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi pasar juga mempengaruhi terjadinya kepailitan BUMN. Penelitian tersebut menekankan pentingnya adanya koordinasi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku pasar dalam mengatasi masalah kepailitan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi masalah kepailitan BUMN sangat penting dan kompleks. Pemerintah harus memperkuat tata kelola perusahaan BUMN, memberikan dukungan keuangan dan program restrukturisasi yang efektif, dan berkoordinasi dengan pelaku pasar untuk mengatasi masalah kepailitan BUMN.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan BUMN. Dalam konteks ini, penelitian akan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kepailitan BUMN, baik dari segi internal BUMN maupun faktor eksternal yang terkait dengan peran pemerintah.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan tindakan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi BUMN serta dalam mencegah dan mengatasi masalah kepailitan BUMN. Dengan menganalisis kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan BUMN, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang

peran pemerintah dalam mendorong keberlanjutan BUMN dan perekonomian negara secara keseluruhan.

Penelitian ini akan membahas analisis kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan BUMN dengan tujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kepailitan, mengevaluasi kebijakan dan tindakan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi BUMN, serta mengevaluasi dampak dari masalah kepailitan BUMN terhadap perekonomian negara. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah dalam mendorong keberlanjutan BUMN dan perekonomian negara secara keseluruhan.

Bagaimana kontribusi pemerintah terhadap terjadinya masalah kepailitan pada badan usaha milik negara, bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan badan usaha milik negara mempengaruhi tingkat risiko kepailitan, seberapa efektif tindakan pemerintah dalam mencegah atau menangani kepailitan badan usaha milik negara serta faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan persaingan pasar, berperan dalam masalah kepailitan badan usaha milik negara merupakan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pemerintah dalam penyelesaian masalah kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman yang lebih kompleks dan mendalam mengenai situasi yang sedang diteliti, terutama terkait interaksi sosial, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu keadaan dimana BUMN tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya kepada para krediturnya (LIRUNGAN, n.d.). Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan permintaan pasar, kenaikan biaya produksi, persaingan yang ketat, dan kesalahan manajemen. Dalam hal ini, ketika BUMN mengalami kepailitan, ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek hukum dan penyelesaiannya (Felix, 2021). Bagian ini berisi analisis dan diskusi. Judul bab ditulis menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12, bold, dengan menggunakan penomoran huruf alfabet kapital, dan dapat diberi nama dengan cara apa pun yang dianggap efektif.

Aspek Hukum Kepailitan BUMN

Kepailitan BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagai sebuah badan usaha, BUMN memiliki kewajiban untuk membayar utangnya tepat waktu (Hutajulu, 2020). Jika BUMN tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Adapun tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan yaitu:

- Ada kreditur yang memiliki utang lebih dari satu buah dan jumlahnya lebih dari batas yang ditetapkan oleh undang-undang.
- Ada bukti yang cukup bahwa BUMN tidak mampu membayar utangnya.
- Ada dasar hukum yang jelas mengenai kepailitan BUMN, yang dalam hal ini diatur oleh UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Nugroho & SH, 2018).

Setelah permohonan kepailitan diajukan, maka proses kepailitan BUMN akan dimulai. Pengadilan Niaga akan menetapkan penundaan pembayaran utang untuk BUMN selama 45 hari. Selama periode ini, pihak kreditur tidak diperbolehkan melakukan tindakan apa pun untuk mengumpulkan utang dari BUMN. Tujuan dari penundaan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi BUMN untuk menyusun rencana restrukturisasi keuangannya.

Jika dalam 45 hari tersebut BUMN tidak dapat menyusun rencana restrukturisasi, maka pengadilan dapat mengeluarkan putusan pailit terhadap BUMN. Dalam hal ini, aset BUMN akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membayar kreditur sesuai dengan peringkat prioritas

yang telah ditetapkan dalam undang-undang (LIRUNGAN,2020). Pada umumnya, prioritas pembayaran utang dalam kepailitan BUMN adalah sebagai berikut:

- Biaya kepailitan, yaitu biaya-biaya yang timbul dalam proses kepailitan.
- Kreditur preferen, yaitu kreditur yang mempunyai hak istimewa dalam pemberian pembayaran atas utangnya.
- Kreditur konvensional, yaitu kreditur yang mempunyai hak yang sama dalam pembayaran atas utangnya.
- Saham pemegang saham, yaitu pemilik saham BUMN yang mengalami kepailitan.

Penyelesaian Kepailitan BUMN

Penyelesaian kepailitan BUMN dapat dilakukan melalui beberapa cara, tergantung pada kondisi keuangan dan struktur organisasi BUMN tersebut. Beberapa cara penyelesaian kepailitan BUMN yang umum dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU adalah upaya untuk menunda atau memperpanjang jangka waktu pembayaran utang oleh pihak yang terkena dampak kepailitan (Nugroho & SH, 2018)PKPU dapat dilakukan dengan persetujuan pihak kreditur atau melalui putusan pengadilan. Dalam konteks BUMN, PKPU dapat dilakukan jika BUMN tersebut masih memiliki potensi untuk bangkit dari krisis keuangan dan masih mampu membayar utang-utangnya di masa depan (Hutajulu, 2020).

2. Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi utang dilakukan dengan cara mengubah perjanjian hutang piutang yang telah disepakati sebelumnya antara BUMN dan krediturnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban hutang BUMN dan memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian keuangan dalam rangka memperbaiki kinerja perusahaan. Restrukturisasi utang dapat dilakukan melalui negosiasi dengan pihak kreditur atau melalui putusan pengadilan.

3. Likuidasi

Likuidasi adalah proses pengalihan aset BUMN kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk membayar utang-utang yang belum terbayar. Dalam konteks BUMN, likuidasi dapat dilakukan jika BUMN tersebut telah dinyatakan pailit dan tidak memiliki potensi untuk bangkit dari krisis keuangan (Swastiningsih & Prasetyawati, 2022). Dalam hal ini, aset-aset BUMN akan dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk membayar utang-utangnya.

4. Penjualan Saham

Penjualan saham dilakukan dengan cara menjual saham-saham BUMN kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk membayar utang-utang yang belum terbayar. Dalam konteks BUMN, penjualan saham dapat dilakukan jika BUMN tersebut masih memiliki potensi untuk bangkit dari krisis keuangan namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Dalam hal ini, BUMN dapat menjual saham kepada investor atau perusahaan lain untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya.

5. Merger atau Akuisisi

Merger atau akuisisi dilakukan dengan cara menggabungkan BUMN yang telah dinyatakan pailit dengan perusahaan lain yang masih sehat secara finansial (Dwijowijoto & Wrihatnolo, 2008).. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian antara BUMN dan perusahaan lain dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja BUMN. Dalam hal ini, perusahaan yang mengakuisisi BUMN akan membayar utang-utang BUMN tersebut dan BUMN tersebut akan menjadi bagian dari perusahaan yang mengakuisisinya.

Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan BUMN untuk Mengurangi Tingkat Risiko Kepailitan

Pemerintah dalam pengelolaan badan usaha milik negara memiliki peran penting dalam mengelola risiko kepailitan perusahaan. Kebijakan pemerintah dalam hal ini dapat mempengaruhi tingkat risiko kepailitan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan umum, kepailitan perusahaan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pengelolaan keuangan yang buruk, penurunan kinerja bisnis, persaingan yang ketat, dan

perubahan kondisi pasar. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang dapat membantu mengurangi risiko kepailitan perusahaan sangatlah penting.

Ada beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada tingkat risiko kepailitan BUMN, di antaranya adalah:

- **Pengawasan dan pengendalian keuangan.**
Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan keuangan BUMN. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa BUMN memiliki sistem pengendalian keuangan yang baik dan teratur, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dana. Dalam mengelola keuangan BUMN, pemerintah juga harus mempertimbangkan tingkat hutang yang diambil oleh perusahaan (Moeljono, 2004). Peningkatan hutang yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko kepailitan BUMN.
- **Perencanaan dan Pengembangan Bisnis**
Pemerintah dapat membantu mengurangi risiko kepailitan BUMN dengan melakukan perencanaan dan pengembangan bisnis yang baik. Dalam hal ini, pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan kondisi pasar, persaingan, dan trend bisnis yang sedang berkembang. Pemerintah juga harus memastikan bahwa BUMN memiliki strategi bisnis yang jelas dan terarah, sehingga dapat menghindari kesalahan strategi yang dapat menyebabkan kerugian yang besar.
- **Pemberian Subsidi atau Dukungan Keuangan**
Pemerintah dapat memberikan subsidi atau dukungan keuangan kepada BUMN untuk membantu mengurangi risiko kepailitan perusahaan. Subsidi atau dukungan keuangan yang diberikan dapat digunakan untuk memperkuat keuangan BUMN atau untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Namun, pemberian subsidi atau dukungan keuangan harus dilakukan dengan bijak, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan atau membahayakan keuangan negara.
- **Regulasi dan Persaingan**
Pemerintah dapat mengurangi risiko kepailitan BUMN dengan mengatur pasar dan persaingan. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa persaingan antara BUMN dan perusahaan swasta berjalan sehat dan tidak merugikan salah satu pihak (Moeljono, 2004). Regulasi pasar dan persaingan yang baik akan mendorong inovasi dan efisiensi di dalam industri, sehingga BUMN dan perusahaan swasta dapat bersaing secara adil dan sehat. Pemerintah juga dapat memberikan perlindungan atau insentif bagi BUMN yang memiliki kontribusi strategis bagi negara.
- **Peningkatan Kualitas Manajemen**
Pemerintah dapat membantu mengurangi risiko kepailitan BUMN dengan meningkatkan kualitas manajemen perusahaan. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan manajemen kepada karyawan BUMN atau melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan (Pranoto, 2010). Peningkatan kualitas manajemen akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN, sehingga dapat mengurangi risiko kepailitan.
- **Diversifikasi Bisnis**
Pemerintah dapat membantu mengurangi risiko kepailitan BUMN dengan mendorong diversifikasi bisnis. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan insentif atau mendukung investasi BUMN di bidang-bidang baru yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Diversifikasi bisnis akan mengurangi risiko BUMN karena perusahaan tidak tergantung pada satu jenis produk atau layanan yang bisa saja mengalami penurunan permintaan atau perubahan pasar.

Namun, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan BUMN juga dapat berdampak negatif pada tingkat risiko kepailitan perusahaan. Beberapa kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan risiko kepailitan BUMN, di antaranya adalah:

- **Kebijakan Subsidi yang Tidak Tepat Sasaran**
Pemberian subsidi atau dukungan keuangan yang tidak tepat sasaran dapat meningkatkan risiko kepailitan BUMN. Jika subsidi atau dukungan keuangan diberikan secara tidak bijak, maka BUMN dapat menjadi tergantung pada pemerintah dan keuangan negara dapat

terancam. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa subsidi atau dukungan keuangan diberikan hanya pada BUMN yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang.

- **Regulasi Pasar dan Persaingan yang Terlalu Ketat**
Regulasi pasar dan persaingan yang terlalu ketat dapat meningkatkan risiko kepailitan BUMN. Jika persaingan terlalu ketat, maka BUMN akan kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan swasta dan mempertahankan pangsa pasarnya. Selain itu, regulasi pasar yang terlalu ketat dapat membuat BUMN kesulitan untuk mengambil keputusan bisnis yang cepat dan fleksibel, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang besar.
- **Kebijakan Investasi yang Kurang Bijak**
Kebijakan investasi yang kurang bijak dapat meningkatkan risiko kepailitan BUMN. Jika pemerintah mengambil keputusan investasi yang buruk atau tidak tepat, maka BUMN dapat mengalami kerugian besar dan terancam mengalami kebangkrutan (Waskito, 2016).
- **Intervensi Politik yang Berlebihan**
Intervensi politik yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kepailitan BUMN. Jika pemerintah terlalu sering melakukan intervensi politik pada BUMN, maka keputusan bisnis perusahaan dapat terganggu dan tidak berjalan sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Selain itu, intervensi politik yang berlebihan dapat membuat BUMN terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah dan mengabaikan persaingan di pasar.
- **Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas**
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN dapat meningkatkan risiko kepailitan. Jika pengelolaan BUMN tidak transparan dan akuntabel, maka keputusan bisnis perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat menyebabkan BUMN melakukan investasi yang tidak tepat atau membuat keputusan bisnis yang merugikan perusahaan (Pranoto, 2010).

Faktor Eksternal yang Berperan dalam Kepailitan

Kepailitan badan usaha milik negara (BUMN) dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan persaingan pasar. Faktor-faktor ini dapat berdampak positif atau negatif terhadap kinerja dan keberlanjutan BUMN, dan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan dan memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk beroperasi dan berkembang.

Perubahan kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak yang signifikan pada BUMN, terutama jika kebijakan tersebut terkait dengan regulasi industri atau infrastruktur yang sangat mempengaruhi operasi BUMN. Kebijakan yang merugikan BUMN seperti penurunan subsidi atau peningkatan pajak dapat mengurangi pendapatan mereka dan memperburuk kinerja keuangan. Kebijakan yang menguntungkan BUMN seperti peningkatan subsidi atau insentif pajak dapat meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, perubahan kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor kunci dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan BUMN.

Kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi kinerja BUMN. Saat ekonomi tumbuh, BUMN dapat mengalami peningkatan permintaan dan pendapatan yang positif (Davids et al., 2021). Namun, ketika ekonomi melambat atau terjadi resesi, BUMN dapat mengalami penurunan permintaan dan pendapatan yang negatif. Selain itu, kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi biaya produksi dan pengeluaran BUMN, seperti biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, BUMN mungkin juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendanaan untuk investasi jangka panjang.

Persaingan pasar adalah faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi kinerja BUMN. Persaingan yang ketat dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar dan pendapatan, sementara persaingan yang kurang ketat dapat memungkinkan BUMN untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar (Dwijowijoto & Wrihatnolo, 2008). Persaingan yang sehat dapat memacu inovasi dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan BUMN. Namun, persaingan yang

tidak sehat dapat menyebabkan BUMN menggunakan praktik bisnis yang tidak etis atau melanggar hukum untuk memenangkan persaingan.

Selain faktor-faktor di atas, faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja BUMN meliputi fluktuasi harga komoditas, risiko geopolitik, perubahan teknologi, dan faktor-faktor lingkungan seperti perubahan iklim atau bencana alam. Semua faktor eksternal ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja BUMN, baik secara positif maupun negatif (Moeljono, 2004)

Dalam menghadapi faktor-faktor eksternal ini, BUMN harus dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang ada. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh BUMN untuk menghadapi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja mereka:

- Menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah dan stakeholders lainnya: BUMN harus menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah dan stakeholders lainnya, seperti masyarakat, pelanggan, dan investor. Hal ini dapat membantu BUMN untuk memperoleh dukungan yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan kebijakan pemerintah dan persaingan pasar yang ketat.
- Diversifikasi bisnis: BUMN harus mempertimbangkan diversifikasi bisnis sebagai strategi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga komoditas atau perubahan teknologi. Diversifikasi bisnis juga dapat membantu BUMN untuk memperoleh sumber pendapatan yang lebih stabil dan meningkatkan pangsa pasar mereka di berbagai sektor.
- Meningkatkan efisiensi operasional: BUMN harus meningkatkan efisiensi operasional mereka untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan mengurangi biaya produksi. Hal ini dapat membantu BUMN untuk menghadapi persaingan pasar yang ketat dan kondisi ekonomi yang sulit.
- Mengembangkan inovasi: BUMN harus mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Inovasi juga dapat membantu BUMN untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan meningkatkan pangsa pasar mereka.
- Mengelola risiko: BUMN harus mengelola risiko dengan baik untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang tidak terduga, seperti risiko geopolitik atau perubahan iklim. Hal ini dapat membantu BUMN untuk meminimalkan dampak negatif dari faktor eksternal dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari peluang bisnis yang ada.

Dalam menghadapi faktor-faktor eksternal, BUMN juga harus memperhatikan tiga aspek kunci, yaitu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen risiko. Manajemen keuangan yang baik dapat membantu BUMN dalam mengelola arus kas dan memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk beroperasi dan berkembang. Manajemen sumber daya manusia yang baik dapat membantu BUMN untuk mengembangkan karyawan yang berkualitas dan berkompeten serta meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional mereka. Sementara itu, manajemen risiko yang baik dapat membantu BUMN dalam mengelola risiko dan meminimalkan dampak negatif dari faktor eksternal.

Secara keseluruhan, faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan persaingan pasar dapat mempengaruhi kinerja BUMN. Oleh karena itu, BUMN harus dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang ada dan mengembangkan strategi yang dapat membantu mereka untuk menghadapi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja mereka. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari lingkungan bisnis yang ada. Dengan melakukan analisis ini, BUMN dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja mereka.

Selain itu, BUMN juga harus memperhatikan faktor internal seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen risiko (Pranoto, 2010). Manajemen keuangan yang baik dapat membantu BUMN dalam mengelola arus kas dan pendanaan yang diperlukan untuk operasi dan pengembangan mereka. Manajemen sumber daya manusia yang baik dapat membantu BUMN dalam mengembangkan karyawan yang berkualitas dan meningkatkan kinerja

mereka. Sedangkan manajemen risiko yang baik dapat membantu BUMN dalam mengelola risiko dan meminimalkan dampak negatif dari faktor eksternal.

Selain itu, BUMN juga dapat mengambil langkah-langkah spesifik untuk menghadapi faktor-faktor eksternal tertentu. Sebagai contoh, jika BUMN menghadapi perubahan kebijakan pemerintah, mereka dapat berkomunikasi dengan pemerintah untuk memahami implikasi kebijakan baru dan membantu mempengaruhi pembentukan kebijakan yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Jika BUMN menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, mereka dapat mengurangi biaya produksi, melakukan diversifikasi bisnis, atau mengejar peluang baru untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sementara itu, jika BUMN menghadapi persaingan pasar yang ketat, mereka dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, mengejar diferensiasi produk, atau melakukan penurunan harga untuk menarik pelanggan.

Dalam rangka untuk berhasil menghadapi faktor-faktor eksternal, BUMN juga harus berupaya untuk memperkuat tiga pilar utama yaitu kualitas, inovasi, dan produktivitas (Yasin, 2002). Dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, BUMN dapat memperluas pangsa pasar mereka dan memenangkan kepercayaan pelanggan. Dengan mengembangkan inovasi, BUMN dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya produksi, dan menawarkan produk atau layanan yang lebih baik dari pesaing mereka. Selain itu, inovasi juga dapat membantu BUMN dalam mengembangkan produk atau layanan baru yang lebih sesuai dengan permintaan pasar atau yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Dalam hal ini, BUMN dapat mengembangkan produk atau layanan dengan teknologi yang lebih canggih atau memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.

Produktivitas juga merupakan faktor kunci dalam menghadapi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BUMN. Dengan meningkatkan produktivitas, BUMN dapat memperkuat daya saing mereka dan menurunkan biaya produksi mereka (Yasin, 2002). Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu produksi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan meningkatkan manajemen sumber daya manusia.

Analisis

Ketika sebuah BUMN mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat membayar utangnya, maka perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk pada perekonomian dan kredibilitas negara, sehingga pemerintah perlu menangani masalah tersebut dengan cepat dan tepat untuk meminimalkan dampak negatifnya (Prisintyas et al., 2021)

Faktor yang paling penting dalam terjadinya masalah kepailitan BUMN adalah kebijakan pemerintah yang tidak efektif atau kurang transparan. Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis BUMN, seperti regulasi yang berlebihan atau kebijakan harga yang tidak realistis, dapat mempengaruhi kinerja keuangan BUMN secara negatif (Wadiran, 2019). Selain itu, intervensi politik yang berlebihan dalam pengelolaan BUMN juga dapat menyebabkan masalah kepailitan. Intervensi politik ini dapat berupa penunjukan pejabat yang tidak berkualitas sebagai pimpinan BUMN, campur tangan dalam proses pengambilan keputusan bisnis, atau penggunaan BUMN untuk kepentingan politik tertentu (Prisintyas et al., 2021).

Selain faktor-faktor tersebut, masalah kepailitan BUMN juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, inflasi, atau fluktuasi nilai tukar dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan BUMN. Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi permintaan pasar, mengurangi pendapatan BUMN, dan meningkatkan risiko kepailitan.

Selain itu, persaingan yang ketat dari sektor swasta juga dapat menjadi faktor kontribusi terhadap masalah kepailitan BUMN. BUMN sering kali harus bersaing dengan perusahaan swasta yang lebih fleksibel dan dapat beroperasi dengan lebih efisien. Persaingan ini dapat memaksa BUMN untuk menurunkan harga, meningkatkan kualitas layanan, atau menghadapi tekanan biaya yang lebih tinggi. Jika BUMN tidak dapat beradaptasi dengan persaingan ini, mereka dapat mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kepailitan.

Berikut ini adalah daftar BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengalami kebangkrutan atau pailit dalam beberapa tahun terakhir beserta penanganan dari pemerintah:

Tabel 1. Data Kasus BUMN Pailit beserta Penanganannya oleh Pemerintah

No	Perusahaan	Tahun	Penanganan
1	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2014	Pemerintah menghentikan operasional maskapai penerbangan tersebut dan menyerahkan tugas operasional kepada PT Angkasa Pura II
2	PT Asuransi Jiwasraya	2019	Pemerintah membentuk tim penyelamat yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Jiwasraya juga menjual aset dan melakukan restrukturisasi.
3	PT Garuda Indonesia	2020	Pemerintah memberikan suntikan dana sebesar Rp 8,5 triliun untuk membantu perusahaan yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, Garuda Indonesia juga melakukan restrukturisasi dan program efisiensi.
4	PT Krakatau Steel	2020	Pemerintah memberikan suntikan dana sebesar Rp 3,3 triliun dan melakukan restrukturisasi untuk membantu perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19
5	PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	2021	Pemerintah menyuntikkan dana sebesar Rp 5 triliun untuk membantu perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.

Sumber : Data Diolah

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam menangani masalah kebangkrutan atau kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah memiliki banyak opsi untuk menangani BUMN yang mengalami kesulitan keuangan, seperti restrukturisasi, privatisasi, pemberian dana darurat, merger atau akuisisi, dan pembubaran.

Namun, dalam melakukan penanganan tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kepentingan nasional, hak-hak pekerja, dan perlindungan terhadap kredibilitas negara. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki pengawasan yang ketat terhadap manajemen BUMN untuk meminimalkan risiko kebangkrutan.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kebangkrutan BUMN dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan sistem pengawasan dan manajemen BUMN sehingga dapat menghindari kebangkrutan atau kepailitan. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak kebangkrutan BUMN terhadap perekonomian nasional dan mencari solusi untuk mengatasi dampak negatif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Avianti, I. (2006). Privatisasi BUMN dan Penegakan Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN. *Kinerja*, 10(1), 57–65.
- Davids, F. T. M., Rachmadhani, A. A., Maharani, K. A., Kasanah, R., Raka, S., & Asri, D. P. B. (2021). Kontribusi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Pada Sektor Ekonomi Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Wijayakusuma Law Review*, 3(01).
- Dwijowijoto, R. N., & Wrihatnolo, R. R. (2008). Manajemen privatisasi BUMN. Elex Media Komputindo.
- Felix, M. (2021). (2021). Analisis Kontribusi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BumN) Dalam Mengimplementasikan Prinsip Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia.
- Hutajulu, M. (2020). TINJAUAN YURIDIS PERANAN MENTERI KEUANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP DEBITOR BUMN. *Lex Et Societatis*, 8(4).

- LIRUNGAN, D. K. (n.d.). Eksekusi Harta Pailit Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BumN) Persero.
- Moeljono, D. (2004). Reinvensi BUMN. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2018). Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya. Kencana.
- Pranoto, T. (2010). Privatisasi, GCG, dan Kinerja BUMN. Lembaga Management FE UI.
- Prisintyas, J. N., Mas, E. Y. D., & Pasaribu, B. K. (2021). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(1), 51–68.
- Srimulyo, K. (2001). Menakar Peran BUMN di Era Otonomi. *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*. Tahun XIV, 4, 55–76.
- Swastiningsih, R. W., & Prasetyawati, E. (2022). KEWENANGAN MENTERI. KEUANGAN DALAM. MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT BUMN. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 641–653.
- Wadiran, F. P. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEBAGAI ASET NEGARA DARI PERKARA KEPAILITAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN IKLIM BISNIS YANG KONDUSIF. *LEX PRIVATUM*, 6(7).
- Waskito, P. A. (2016). ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN). *JURNAL NOVUM*, 3(1), 28–37.
- Yasin, M. (2002). Reformasi BUMN: Upaya Menata Ulang Peran Pemerintah Dalam Dunia Usaha. Makalah Seminar Dan Lokakarya Nasional “Strategi Reformasi BUMN” Bisnis Indonesia & FE-UGM, 27–28.